

BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang TK/SD maka perlu memberikan izin operasional kepada TK/SD;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

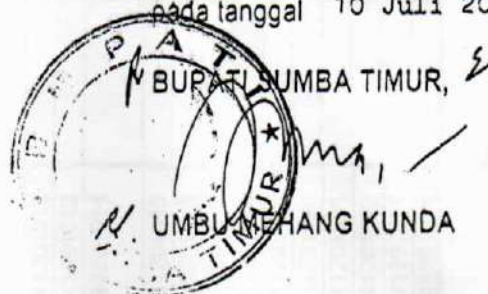
KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka I'K, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

Lampiran II

: Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204/PK.421.1/1.544/VII/2008

Tanggal : 10 Juli 2008

**IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NO.	NAMA SD	TANGGAL DIBUKA	NSS	NPSN	ALAMAT		KETERANGAN
					KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
1	SDI WAINGAPU 2	21-08-1974	101241201002	50303934	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN MATAWAI	
2	SDK ANDALURI	01-08-1948	102241201030	50303859	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN MATAWAI	
3	SDI UMAMAPU	01-01-1978	101241201003	50303941	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	
4	SDI WAINGAPU 3	01-07-1987	101241201061	50303932	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	NAMA LAMA SDI WAINGAPU 4
5	SDN WAINGAPU 4	01-07-1993	101241204060	50303931	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	NAMA LAMA SDN WAINGAPU 5
6	SDN WAINGAPU 1	01-08-1955	101241201001	50303818	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMALAPUTI	
7	SDM WAINGAPU	1947	102241201019	50303714	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMALAPUTI	
8	SDI KAMALAPUTI	01-07-1982	101241201043	50303873	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN HAMBALA	
9	SD MUHAMMADIYAH	01-08-1966	104241201037	50303854	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN HAMBALA	
10	SDN WAINGGAI	01-09-1959	101241201013	50303817	KOTA WAINGAPU	DESA PAMBOTANJARA	
11	SDM MBATAKAPIDU	01-01-1967	102241201034	50303735	KOTA WAINGAPU	DESA MBATAKAPIDU	
12	SDI LUKUKAMARU	01-07-1985	101241201058	50303825	KOTA WAINGAPU	DESA LUKUKAMRU	
13	SDN BIDIPRAING	01-07-1945	101241201012	50303709	KAMBERA	DESA KIRITANA	
14	SDI KALUMBANG	01-01-1978	101241201004	50303874	KAMBERA	KELURAHAN WANGGA	
15	SDM PRAIWORA	01-08-1958	102241201022	50303753	KAMBERA	KELURAHAN WANGGA	
16	SDI KALU	22-07-1980	101241201038	50303875	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
17	SDM PAYETI 1	01-08-1933	102241201020	50303758	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
18	SDM PAYETI 2	01-08-1941	102241201021	50303757	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
19	SDM PAYETI 3	01-01-1967	102241201033	50303756	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
20	SDK KAHANGU ETI	07-02-1967	102241201036	50303857	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
21	SDI PADADITA	29-07-1982	101241201044	50303913	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
22	SDM KAMBANIRU 1	01-08-1975	102241201023	50303905	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
23	SDM KAMBANIRU 2	01-08-1956	102241201024	50303904	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
24	SDI PALINDIMBURUNG	29-07-1982	101241201045	50303925	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
25	SDI PAPINDUNG	22-07-1980	101241201039	50303923	KAMBERA	KELURAHAN MAULIRU	
26	SDM LUMBU MENGGIT	01-08-1949	102241201029	50303739	KAMBERA	KELURAHAN MAUHAU	
27	SDI MALUMBI	22-07-1980	101241201040	50303845	KAMBERA	KELURAHAN MALUMBI	
28	SDM LAMBANAPU	01-08-1914	102241201026	50303742	KAMBERA	KELURAHAN LAMBANAPU	
29	SDK PRAIKUNDU	01-08-1959	102241201031	50303855	KAMBERA	KELURAHAN LAMBANAPU	

103	SDI KANANGGAR	01-04-1978	101241202013	50303872	PABERIWAI	DESA KANANGGAR	
104	SDM KANANGGAR	01-08-1918	102241201014	50303903	PABERIWAI	DESA KANANGGAR	
105	SDI KARERA JANGGA	01-07-1984	101241202041	50303868	PABERIWAI	DESA KARERA JANGGA	
106	SDY KARERA JANGGA	01-01-1969	104241202027	50303865	PABERIWAI	DESA KARERA JANGGA	
107	SDI WINUMURU	01-03-1983	101241202037	50303894	PABERIWAI	DESA WINUMURU	
108	SDY LAITAKU	22-07-1980	104241202029	50303812	PABERIWAI	DESA LAITAKU	
109	SDN LAIMAH	01-08-1963	101241202004	50303727	PABERIWAI	DESA MEHANG MATA	
110	SDI PANJIR	01-01-1978	101241202003	50303924	PABERIWAI	DESA MEHANG MATA	
111	SDN LA AU	01-11-1954	101241202002	50303730	PABERIWAI	DESA PRAIMBANA	
112	SDY MAUMARU	01-08-1948	104241202028	50303762	PABERIWAI	DESA PABERA MANERA	
113	SDM ANDUWATU	01-08-1929	102241201018	50303910	MATAWAI LA PAWU	DESA PRAIBAKUL	
114	SDI MAHAMBALA	29-07-1982	101241202034	50303836	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU TANA	
115	SDN LAWINU	01-09-2000	101241207011		MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU TANA	SD BARU
116	SDI HILWUKU	29-07-1982	101241202033	50303877	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU LUKU	
117	SDM LAIMETA	01-01-1966	102241201023	50303760	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKU LUKU	
118	SDN LAHUA	01-08-1955	101241202007	50303728	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKUWAI	
119	SDI LANGIRA	01-07-1985	101241202042	50303826	MATAWAI LA PAWU	DESA KATIKUWAI	
120	SDM LAIRONJA	01-08-1927	102241201020	50303744	MATAWAI LA PAWU	DESA WANGGAMETI	
121	SDI WATUPATINJANG	01-07-1983	101241202038	50303912	MATAWAI LA PAWU	DESA KARIPI	
122	SDN KAMBAUNI	01-07-2003	101241207012		MATAWAI LA PAWU	DESA KARIPI	SD BARU
123	SDM KAMANGGIH	01-08-1947	102241201016	50303906	KAHAUNGU ETI	DESA KAMANGGIH	
124	SDN LA OMANG	01-11-1963	101241202005	50303729	KAHAUNGU ETI	DESA KAMBATA BUNDUNG	
125	SDN KALOKA	01-07-2001	101241207013		KAHAUNGU ETI	DESA KAMBATA BUNDUNG	SD BARU
126	SDM MAURAMBA	01-11-1918	102241201042	50303736	KAHAUNGU ETI	DESA MAURAMBA	
127	SDM LAIMBONGA	01-08-1900	102241201017	50303822	KAHAUNGU ETI	DESA LAIMBONGA	
128	SDI YUBUWAI	01-03-1983	101241201053	50303889	KAHAUNGU ETI	DESA KOTAK KAWAU	
129	SDN NARI	01-11-1950	101241201006	50303805	KAHAUNGU ETI	DESA KOTAK KAWAU	
131	SDN KATAKA	01-08-1954	101241203004	50303718	KAHAUNGU ETI	DESA KATAKA	
131	SDI MATAWAI MARINGU	01-07-1983	101241203023	50303849	KAHAUNGU ETI	DESA MATAWAI MARINGU	
132	SDI LAKOMBU	01-07-1983	101241202044	50303827	KAHAUNGU ETI	DESA MEURUMBA	
133	SDK LINDI PINGU	01-08-1965	104241202024	50303886	KAHAUNGU ETI	DESA MEURUMBA	
134	SDN MATAWAI KATINGGA		101241207023		KAHAUNGU ETI	DESA MATAWAI KATINGGA	SD BARU
135	SDN NGARUKAHIRI	01-03-1963	101241201010	50303801	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA LUKUWINGIR	
136	SDI LAIMETA	01-07-1983	101241202040		KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA LAIMETA	
137	SDN TANA RIDU	2007	101241207024		KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA LAIMETA	SD BARU
138	SDN PENANG	01-08-1954	101241202031	50303797	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA MAHUBOKUL	
139	SDI MARADAMUNDI	01-07-1982	101241201047	50303850	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA MARADAMUNDI	
140	SDN LUMBUNG	01-08-1960	101241206001	50303722	KAMBATA MA PAMBUHANG	DESA MAIDAN'S	

212	SDM WATUMBELAR	01-08-1928	102241205012	50303710	LEWA TIDAHU	DESA WATUMBELAR	
213	SDM KAWUNGGAR	01-10-1958	102241205011	50303901	LEWA TIDAHU	DESA BIDIPRAING	
214	SDI PRAIMARADA	29-07-1983	101241205021	50303916	LEWA TIDAHU	DESA UMAMANU	
215	SDN UMAMANU	01-11-1963	101241205005	50303820	LEWA TIDAHU	DESA MONDU LAMBI	
216	SDI KANGELI	01-03-1976	101241205004	50303870	LEWA TIDAHU	DESA KANGELI	NAMA LAMA SDN LAIHAI
217	SDN LAIHAI	01-03-1983	101241205024	50303726	LEWA TIDAHU	DESA LAI HAU	NAMA LAMA SDI KANGELI
218	SDN MATAWAI IWI	01-10-1952	101241205006	50303720	KATALA HAMU LINGU	DESA KOMBAPARI	
219	SDI LAIKONDANG	01-08-1985	101241205027	50303832	KATALA HAMU LINGU	DESA MATAWAI AMAHU	
220	SDN MANDAS	01-09-1962	101241205007	50303721	KATALA HAMU LINGU	DESA MENDAHU	
221	SDN LAILARA	29-07-1982	101241205023	50303831	KATALA HAMU LINGU	DESA LAILARA	
222	SDM TAWAKIHU	09-08-1947	102241205013	50303748	KATALA HAMU LINGU	DESA PRAIBAKUL	



KABUPATEN SUMBA TIMUR, S

UMBU MEHANG KUNDA